

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR KITA TAHUN 2025

JL. RAYA DALUNG
BUDUK NO. 8X DALUNG
KUTA UTARA BADUNG

TELEPON: 0361-9006959

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KITA
Alamat	JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG, KUTA UTARA, BADUNG
Nomor Telepon	(031) 9006959

Penjelasan Umum:

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR KITA pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja di PT BPR KITA, meskipun menghadapi tantangan di sepanjang tahun 2025 yaitu masih adanya Kredit Kualitas Rendah (KKR). PT. BPR KITA memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK sehingga PT. BPR KITA dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Badung. Penerapan Tata Kelola yang Baik di PT. BPR KITA didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT. BPR KITA.

PT. BPR KITA telah beroperasi lebih dari 21 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadikan PT BPR KITA sebagai Bank yang sehat dan kuat serta dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan untuk melayani usaha mikro, menengah di Bali.

Dalam penerapan Tata Kelola PT. BPR KITA selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan di sepanjang tahun 2025. PT BPR KITA tetap memperhatikan perubahan regulasi, perkembangan teknologi serta tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi arah dan fokus Tata Kelola di PT. BPR KITA sehingga PT. BPR KITA terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT BPR KITA selama periode pelaporan semester II tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Tata Kelola telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Struktur, proses, dan hasil penerapan Tata Kelola menunjukkan efektivitas pengelolaan Bank yang memadai serta didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan fungsi kepatuhan yang berjalan baik. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen PT BPR KITA. Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek penilaian Tata Kelola, serta dominannya faktor-faktor positif dibandingkan faktor negatif, maka peringkat pelaksanaan Tata Kelola PT BPR KITA ditetapkan pada Peringkat 2 (Baik), yang mencerminkan bahwa Bank dikelola secara prudent, transparan, dan bertanggung jawab serta memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola risiko dan menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Manajemen PT BPR KITA telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Agus Prima Wardana Dharma Putra
	Jabatan	Direktur Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama yg telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test). Telah dilakukan pengangkatan kembali sesuai Akte No 1 , tanggal 01 Desember 2025 di Notaris I Made Mertajaya,SH dan telah mengikuti sertifikasi Direktur berlaku mulai tanggal 24 Januari 2022 s/ d 24 Januari 2027. Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yg diatur dlm anggaran dasar PT BPR KITA dan ketentuan sesuai POJK Nomor 09 Tahun 2024 serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank utk jangka panjang, menengah maupun tahunan dan disampaikan dlm bentuk Rencana Bisnis Bank utk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dlm RUPS sebelum diajukan ke OJK sebagaimana dlm ketentuan OJK;
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan GCG dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dlm setiap kegiatan usaha Bank pd seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan;
4. Direktur Utama mengangkat pejabat eksekutif Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Bisnis, pejabat eksekutif audit internal, PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko;
5. Menindaklanjuti hasil temuan audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas lain;
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara periodik/terus menerus;
7. Membuat laporan tahunan utk dokumentasi keuangan secara transparan;
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS;
9. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yg bersifat strategis di bidang kepegawaian;

Direktur utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yg diatur dlm anggaran dasar PT BPR KITA dan ketentuan sesuai POJK Nomor 09 Tahun 2024 serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan

kepengurusan Bank.

2.	Nama	Ir I Gde Made Jaya Danu
	Jabatan	Direktur YMF Kepatuhan

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggungjawab Direktur YMFK telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test). Telah dilakukan pengangkatan kembali sesuai Akte No 39, tanggal 28 Oktober 2022 di Notaris I Putu Chandra,SH dan telah mengikuti sertifikasi Direktur YMFK berlaku mulai tanggal 20 Desember 2021 s/d 20 Desember 2026. Direktur YMFK yg dlm melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yg diatur dlm anggaran dasar PT BPR KITA dan ketentuan sesuai POJK Nomor 09 Tahun 2024 serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank , antara lain :

1. Bertanggung jawab menetapkan langkah-langkah yg diperlukan utk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dlm rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
 2. Memantau dan menjaga kegiatan BPR tidak menyimpang dari kegiatan perundang-undangan;
 3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yg dibuat BPR kepada OJK ;
 4. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 5. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yg akan ditetapkan oleh Direksi;
 6. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 7. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan;
 8. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pemasukan pendanaan baik berupa Tabungan dan Deposito;
 9. Direktur yg Membawahkan Fungsi Kepatuhan membawahi langsung pejabat eksekutif manajemen resiko, pejabat eksekutif fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif APU PPT & PPSPM ;
 10. Pengawasan atas kepatuhan Unit kerja/ pegawai dlm menerapkan program APU PPT & PPSPM dan anggota direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan utk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
- Direktur yg Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yg diatur dlm anggaran dasar PT BPR KITA dan ketentuan sesuai POJK Nomor 09 Tahun 2024 serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan prinsip kehati- hatian dilakukan secara konsisten dalam operasional, khususnya perkreditan dan manajemen risiko, dengan kebijakan yang telah disesuaikan dan direview berkala sesuai POJK dan SEOJK.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Peningkatan Pengawasan terhadap Kualitas Kredit Kolektibilitas 1-5 dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sistem monitoring secara berkala melalui rapat dengan bagian kredit (AO) dan memperkuat pengawasan pasca pencairan untuk meminimalkan

risiko kredit bermasalah.

d. Bank juga menyusun dan melaksanakan action plan penyelesaian kredit KKR yang terbukti menurunkan rasio dan nominal KKR secara signifikan pada semester II 2025.

e. Monitoring secara ketat debitur yg termasuk dalam Kredit Kualitas Rendah (KKR) dan Direksi juga telah melakukan pembinaan secara intensif terhadap kredit kualitas rendah untuk menghindari kredit NPL dengan melakukan assesment setiap bulannya berupa Strest Test (Uji Ketahanan) untuk mengukur kemampuan nasabah guna menghindari ancaman yg dapat mempengaruhi permodalan

f. Bank telah melakukan berbagai upaya perbaikan sepanjang tahun 2025. Dalam aspek penyaluran kredit, Bank menerapkan strategi promo kredit di akhir tahun serta memanfaatkan pencairan dana linkage dari Bank CIMB Niaga untuk mendukung ekspansi kredit secara terukur.

g. Dari sisi penghimpunan dana, Bank melakukan optimalisasi pemasaran dan layanan, termasuk peningkatan jumlah nasabah penabung dan deposan baru, serta melakukan penyesuaian suku bunga simpanan guna menjaga efisiensi biaya dana

h. Semua temuan Audit Internal dan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2025

PT BPR KITA telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama serta ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 07 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Pasal 44. Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan telah dilakukan pengangkatan kembali sesuai surat OJK Nomor S-32/KO.181/2026 pd tanggal 29 Januari 2026. Anggota Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya dengan baik yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Ir Victoria Mardiana
	Jabatan	Komisaris Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test). Telah dilakukan pengangkatan kembali sesuai Akte No 17, tanggal 20 Maret 2024 di Notaris I Putu Chandra,SH dan telah mengikuti sertifikasi Komisaris berlaku mulai tanggal 21 September 2023 s/ d 21 September 2028 adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :		
1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.		
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi berdasarkan prinsip kehati-hatian.		
3. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS;		
4. Wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata Kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR;		
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta		

mengambil Keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris dalam penyediaan dana atau penyaluran dana merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;
7. Wajib memastikan atau melakukan pengawasan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/ atau otoritas dan lembaga lain;
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

2.

Nama

Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE

Jabatan

Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test). Telah dilakukan pengangkatan kembali sesuai Akte No 17, tanggal 20 Maret 2024 di Notaris I Putu Chandra,SH dan telah mengikuti sertifikasi Komisaris berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2025 s/d 17 Oktober 2028 adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris memastikan penerapan strategi anti fraud serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud;
2. Wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris;
3. BPR menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Wajib menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS;
5. Kebijakan remunerasi bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris memuat paling sedikit mengenai Struktur remunerasi mengenai skala remunerasi berdasarkan Tingkat dan jabatan, komponen remunerasi dan metode serta mekanisme penetapan remunerasi;
6. Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi;
7. Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan dan Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
8. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;
9. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BPR, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Rekomendasi Kepada Direksi:

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi agar BPR memperkuat strategi bisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai POJK yang ada. Dewan Komisaris mengingatkan agar pengawasan terhadap kualitas kredit kolektibilitas 1,2,3,4 dan 5 lebih ditingkatkan serta menyusun action plan beserta progress day by day terhadap kredit KKR. Dewan Komisaris juga memberikan rekomendasi dalam penyusunan dan pelaksanaan action plan yang lebih terukur atas setiap deviasi antara rencana dan realisasi, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk melakukan penyesuaian strategi bisnis secara prudent, termasuk dalam penetapan suku bunga simpanan dan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif seperti dana linkage. Terhadap deposito berbiaya tinggi, Komisaris memahami bahwa masih diperlukan sebagai sumber dana, mengingat sebagian besar berasal dari nasabah prime dengan nilai penempatan signifikan. Namun demikian, Direksi disarankan untuk tetap melakukan pemantauan likuiditas secara berkala serta mitigasi risiko, khususnya terkait konsentrasi dana dari nasabah dengan penempatan di atas Rp2.000.000.000. Dewan Komisaris berharap agar Direksi dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik, serta untuk menjaga keberlangsungan dan kesehatan PT BPR KITA ke depan.

PT BPR KITA memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama dan ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 07 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Pasal 45. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dengan melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta permohonan kredit untuk pihak terkait dan Dewan Komisaris juga memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka menyukseskan rencana bisnis Bank di PT BPR KITA yang dituangkan dalam laporan evaluasi rencana bisnis Bank.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Agus Prima Wardana Dharma Putra
	Persentase Kepemilikan (%)	7,00

2.	Nama	Ir I Gde Made Jaya Danu
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ir Victoria Mardiana
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Direktur Utama PT BPR KITA memiliki saham sebesar 7% atau sebesar Rp.140.000.000,- pada BPR, kepemilikan saham telah sesuai dengan ketentuan pada POJK Nomor 07 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Agus Prima Wardana Dharma Putra
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Ir I Gde Made Jaya Danu
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Ir Victoria Mardiana
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE

Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tidak memiliki saham pada Kelompok Usaha BPR (Bukan pada BPR) atau Nihil.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Agus Prima Wardana Dharma Putra
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Ir I Gde Made Jaya Danu
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Ir Victoria Mardiana
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR lain dan Perusahaan lain (Nihil).

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Agus Prima Wardana Dharma Putra
----	------	---------------------------------

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Ir I Gde Made Jaya Danu
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ir Victoria Mardiana
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ir I Gede Wayan Margasunu - Menerima Penghasilan
2.	Nama	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Ir I Gede Wayan Margasunu
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Ir Victoria Mardiana - Menerima Penghasilan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Ida Bagus Ketut Arjaya
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	I Made Mudastra ,SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR

Pada POJK Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan SEOJK Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Hubungan Keuangan Dewan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan anggota Dewan Komisaris lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota Direksi tidak ada sedangkan hubungan keuangan Komisaris Ibu Ir.Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah menerima penghasilan dimana Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu merupakan suami dari Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dan Hubungan Keuangan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE dengan Anggota Komisaris Lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lainnya tidak ada dan hubungan keuangan komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Agus Prima Wardana Dharma Putra
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada

	Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Ir I Gde Made Jaya Danu
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Ir Victoria Mardiana - Ipar
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ir I Gede Wayan Margasunu - Kakak Kandung

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ir Victoria Mardiana
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Ir I Gde Made Jaya Danu - Ipar
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ir I Gede Wayan Margasunu - suami
2.	Nama	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ida Bagus Ketut Arjaya - Ayah Kandung

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Ir I Gede Wayan Margasunu
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Ir I Gde Made Jaya Danu - Adik Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Ir Victoria Mardiana - Istri
	Hubungan Keluarga Dengan	Tidak ada

	Pemegang Saham Lain di BPR	
2.	Nama	Ida Bagus Ketut Arjaya
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE - Anak Kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	I Made Mudastra,SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

PT BPR KITA memiliki 2 orang Direksi dimana salah satu Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris. Hal tersebut telah mengacu pada POJK 09 Tahun 2024 pasal 102 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan dapat dijelaskan bahwa Direktur Utama PT BPR KITA tidak memiliki hubungan keluarga antara Komisaris dan Pemegang Saham sedangkan Hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M dengan Komisaris Utama Ibu Ir. Victoria Mardiana adalah Ipar (istri dari Kakak Kandung yang juga merupakan pemegang saham di PT BPR KITA) dan hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M dengan Pemegang Saham Bapak Ir. I Gede Wayan Margasunu adalah Kakak Kandung.

Pada POJK Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan SEOJK Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lainnya tidak ada, Hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Anggota Direksi Bapak Ir I Gde Made Jaya Danu adalah Ipar (Adik Kandung Pemegang Saham) sedangkan hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah suami. Hubungan Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Anggota Direksi tidak ada sedangkan hubungan keluarga Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya adalah Ayah Kandung.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp674.400.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp210.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp257.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp194.027.272
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp37.000.000

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp29.628.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
--	---------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	4,28 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,04 : 1
-------------	----------

PT BPR KITA dalam rasio gaji tertinggi dan gaji terendah telah mengacu pada POJK Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Pasal 102 tentang penerapan fungsi kepatuhan perhitungan gaji tertinggi dan terendah selama 1 tahun di tahun 2025.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	11 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan I; 2. Isu-isu strategis BPR; 3. Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi; 4. Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR; 		
2.	Tanggal Rapat	18 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan II; 2. Manajemen Risiko; 3. Isu-isu strategis BPR; 4. Laporan Penerapan APU PPT & PPPSPM 5. Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi 6. Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR; 		
3.	Tanggal Rapat	22 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan III Tahun		

2025 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnia BPR Triwulan III
2. Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025
3. Isu - isu strategis BPR
4. Konfirmasi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan
5. Evaluasi/ penetapan kebijakan strategis BPR

4.	Tanggal Rapat	10 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Agenda rapat adalah pengawasn operasional PT BPR KITA periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
2. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) kepada PPAK
3. Kinerja Keuangan BPR;
4. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi;

Selama Tahun 2025 Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 09 Tahun 2024 pasal 50 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat yang mana rapat Dewan Komisaris semester IV tahun 2025 diadakan pada tanggal 10 Desember 2025.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ir Victoria Mardiana
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Selama Tahun 2025 kehadiran Dewan Komisaris dilakukan secara fisik dengan datang langsung kekantor dengan agenda kerja memberikan persetujuan, melakukan pemantauan,berdiskusi dan mengevaluasi kegiatan maupun laporan-laporan PT BPR KITA di tahun 2025.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus

Hukum Pada Tahun Laporan

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses **0 kasus**

Hukum Pada Tahun Laporan

Pada Tahun 2025 PT BPR KITA tidak ada penyimpangan internal (Internal Fraud).

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	----------------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	----------------

Pada tahun 2025 PT BPR KITA tidak terdapat permasalahan hukum (Nihil).

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Ir I Gede Wayan Margasunu
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Pemegang Saham
	Nama Pengambil Keputusan	Agus Prima Wardana Dharma Putra,S.E.,M.M
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama
	Jenis Transaksi	Sewa Menyewa Gedung Kantor Pusat
	Nilai Transaksi	Rp120.000.000

Keterangan:

Transaksi tersebut disetujui atas dasar pertimbangan harga sewa lebih rendah dibanding harga pasar dilingkungan sekitar yang telah di setujui dalam RUPS.

Pada Tahun 2025 terdapat transaksi sewa menyewa gedung kantor yang melibatkan pemegang saham pengendali, namun dari hasil riview audit menyatakan transaksi sewa menyewa tersebut menguntungkan PT BPR KITA karena memperoleh biaya sewa yang lebih rendah dibanding harga pasar. Transaksi tersebut telah dilaksanakan secara profesional,

didukung dengan perjanjian yang jelas, nilai transaksi yang wajar sesuai kondisi pasar, serta tidak terdapat perlakuan istimewa yang merugikan PT BPR KITA. Untuk itu transaksi tersebut tidak menimbulkan kerugian finansial, tidak berdampak negatif terhadap kinerja bank, serta tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada Tahun 2025 tidak ada Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik (Nihil).

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KITA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badung, 14 April 2026

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KITA

Menyetujui




Agus Prima Wardana Dharma Putra, SE.,M.M
Direktur Utama


Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE.,M.Si
Komisaris

Lembar Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola
PT Bank Perekonomian Rakyat Kita Tahun 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PT Bank Perekonomian Rakyat Kita Tahun 2025 telah ditinjau dan dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 April 2026
PT Bank Perekonomian Rakyat Kita



Agus Prima Wardana Dharma Putra, SE., M.M
Direktur Utama

Ir I Gde Made Jaya Danu, M.M
Direktur YMF Kepatuhan

Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE, M.Si
Komisaris